

PENDIDIKAN EKONOMI MELALUI INTEGRASI NILAI-NILAI PANCASILA DAN EKONOMI KERAKYATAN

NANIS HAIRUNISYA

ABSTRAK

Tulisan ini akan memberikan suatu pemikiran tentang upaya meningkatkan kurikulum ekonomi, bahan dan tehnik pedagogis untuk mengajar ekonomi di semua tingkat pendidikan. Pendidikan ekonomi ini akan dikembangkan berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan ekonomi kerakyatan.

LATAR BELAKANG

Pancasila sebagai dasar, pandangan hidup, filsafat negara, ideologi nasional dan sebagai platform nasional sejak 18 Agustus 1945 sangat penting untuk diwariskan kepada generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia melalui pendidikan agar tidak kehilangan jati diri Bangsa Indonesia. Pendidikan di perguruan tinggi memegang peranan yang sangat penting untuk mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di era reformasi yang ditandai dengan jatuhnya rezim Soeharto, Pancasila semakin sulit dan termarginalkan dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Euforia demokrasi yang mengusung kebebasan cenderung mengesampingkan aspek pendidikan moral. Pendidikan Pancasila yang dahulu dijadikan benteng moral bagi generasi muda telah 'dikerdilkan' ke dalam format Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang sarat dengan pendidikan demokrasi namun minim pendidikan moral. Dekandensi moral remaja akhir-akhir ini menyadarkan kita akan pentingnya 'menghi-

dupkan' kembali Pendidikan Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa sebagaimana diamanatkan oleh MPR-RI. (Triyanto dkk, 2012)

Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia bukan tanpa ideologi. Kemerdekaan kita berlandaskan Doktrin Kebangsaan dan Doktrin Kerakyatan sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Doktrin kebangsaan terkait dengan ke-Bhinekaan Tunggal Ika-an, dengan pluralisme dan multikulturalisme yang harus disatukan oleh "rasa bersama" dalam idiom nation state berikut semangat nasionalisme yang menyertainya. Nasionalisme menegaskan bahwa kepentingan nasional harus diutamakan tanpa mengabaikan tanggung jawab global. (Sri Edi Swasono; 2012; 2)

Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Darma Mangrwa (yang beraneka itu adalah satu tidak ada kewajiban yang mendua hanya demi bangsa dan negara yang satu), merupakan suatu warisan nilai yang sangat dalam maknanya untuk bangsa Indonesia. Indonesia sangat beraneka ragam, pluralistik dan multikulturalistik, namun satu, ikatan kesatuannya adalah Pancasila. Pancasila berfungsi sebagai pemer-satu (common platform) bagi

Alamat Korespondensia:

Nanis Hairunisyia, Dosen Universitas Panca Marga Probolinggo

Email: anisa889@gmail.com

pluraisme dan multikulturalisme yang tidak bisa diperselisihkan lagi yang seharusnya digunakan sebagai konsensus nasional. Inilah embrio dari nasionalisme Indonesia bagi seluruh bangsa Indonesia.

Kenyataan bahwa pembangunan telah menggusur orang miskin dan bukan kemiskinan, warga negara asing sebagai pemegang konsesi bagi usaha-usaha ekonomi yang strategis sementara orang Indonesia hanya sebagai pekerja dan penonton saja. Selain itu “daulat pasar” telah menggusur “daulat rakyat”. Yang terjadi hanyalah marginalisasi rakyat dengan pemujaan pada pasar (market fundamentalism) pemujaan pasar ini memperbesar yang kuat dan menghancurkan yang lemah. Penjajahan di bidang ekonomi masih terus berlangsung dengan beralihnya kepemilikan si lemah pada si kuat.

Sampai detik ini kesejahteraan masyarakat masih terus diusahakan dengan suatu ketidakpastian apalagi dengan kenaikan BBM membuat rakyat kecil semakin termarginalkan dari kehidupan ekonomi. Indonesia mencatat tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia pada tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. Meski begitu, laju tingkat kemiskinan penduduk di Indonesia dinilai tidak seimbang jika dibandingkan dengan laju tingkat kekayaan. Ketimpangan bukan karena orang miskin tambah miskin, orang miskin memang naik kelas, tapi orang kaya kenaikannya lebih tinggi, jadi tidak seimbang (Doddy Zulverdi, 18/2/2014).

Hal itu terbukti dengan angka tingkat kesenjangan ekonomi (Gini Rasio) penduduk Indonesia meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2012. Bank Indonesia (BI) mencatat Gini Rasio pada 2013 lebih tinggi

dibandingkan tahun 2012 yaitu mencapai 0,41%. Indonesia pernah memiliki angka gini rasio terendah di level 0,35% pada 2008.

Selain itu tulisan ini bertujuan untuk mengingatkan kembali pada Bangsa Indonesia, bahwa untuk menghadapi tantangan yang semakin berat di masa yang akan datang terutama adanya AFTA 2015 itu kita sudah mempunyai idiologi yang kuat yaitu Pancasila yang harus dijadikan benteng pertahanan nilai. AFTA 2015 sudah di depan mata. Beberapa bulan lagi Bangsa Indonesia siap tidak siap harus menghadapinya. Pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan merupakan suatu keharusan untuk meghadapi dan menjalani AFTA tersebut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tingkat kualitas sumber daya manusis Indonesia secara umum masih berada dibawah kualitas negara lain di ASEAN.

Tulisan ini akan memberikan suatu pemikiran tentang upaya meningkatkan kurikulum ekonomi, bahan dan tehnik pedagogis untuk mengajar ekonomi di semua tingkat pendidikan. pendidikan ekonomi berbasis pada nilai-nilai Pancasila dan ekonomi kerakyatan.

Sebagai wahana pendidikan ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan ekonomi kerakyatan sebenarnya kita sudah mempunyai wadah perjuangan yaitu melalui koperasi. Koperasi adalah badan usaha dan wadah yang tepat untuk ekonomi rakyat berdasarkan paham kooperative. Kesemuanya mendukung percepatan upaya melaksanakan transformasi ekonomi dan transformasi sosial. Peran strategis ekonomi rakyat ini harus benar-benar dipahami. Wadah ekonomi rakyat yang paling tepat

adalah koperasi apalagi kita memperhatikan doktrin kebangsaan dan doktrin kerakyatan yang diemban oleh sistem ekonomi nasional yaitu Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. Pertanyaan dasarnya adalah mengapa kita terjebak oleh pola pikir kompetitivisme dan tidak mengutamakan kooperativisme. Efisien tidak hanya bisa dicapai melalui persaingan yang ganas tetapi bisa juga dicapai melalui kerjasama yang menghasilkan efisiensi sinergik yang berlipat.

Permasalahannya adalah: bagaimana menerapkan pendidikan ekonomi di semua tingkat satuan pendidikan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan ekonomi kerakyatan, sebagai wahana pendidikan ekonomi yang bermoral bagi peserta didik melalui koperasi yang sudah mulai dilupakan oleh generasi muda.

PEMBAHASAN

Pancasila : Makna dan Realitas.

Masyarakat yang lahirnya sebelum orde baru sampai dengan orde baru pastilah tidak asing dengan sila-sila dan makna Pancasila. Namun generasi yang lahir setelah orde baru, perlu dipertanyakan lagi apakah mereka masih hafal sila-sila dalam Pancasila atau mungkin mereka hanya pernah mendengar kata Pancasila. Kembali penulis memaknai sila-sila yang ada dalam Pancasila sebagai berikut:

Sila Pertama, Ke Tuhanan Yang Maha Esa. Mengajarkan untuk bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita warga Indonesia masing-masing memiliki agama dan keyakinan yang berbeda. Indonesia memiliki 5 agama yang diakui yaitu, Islam, Protestan, Katolik, Hindu,

dan Budha. Walau kita berbeda tetapi kita harus hidup rukun dengan sikap saling hormat-menghormati antar pemeluk agama lain di kehidupan sehari-hari sebagai pengamalan dari Sila Pertama dalam kehidupan sehari-hari.

Sila Kedua, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Mengajarkan kita untuk memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung nilai – nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lakukan dengan membantu orang yang kesusahan tanpa memandang agama, derajat, ras dan golongan ekonomi yang berbeda.

Sila Ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ketiga benar-benar menggambarkan Pancasila. *Bhineka Tunggal Ika*, yang artinya walaupun kita berbeda-beda tetapi kita tetap satu. Indonesia memiliki bermacam-macam suku, adat, budaya, dan berjuta-juta penduduk yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Persatuan itu mendorong untuk tercapainya kehidupan yang bebas di Negara yang Merdeka dan Berdaulat.

Sila keempat, Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita sebagai warga negara dan warga-masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam keputusan yang menyangkut kepentingan bersama terlebih dahulu diadakan musyawarah, dan keputusan musyawarah diusahakan secara mufakat. Menghormati setiap hasil keputusan musyawarah dan melaksanakannya dengan rasa tanggungjawab. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa,

menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Sila kelima, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bersikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Memupuk sikap suka bekerja keras dan menghargai karya orang lain yang bermanfaat, serta bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan kesejahteraan bersama.

Munculnya gelombang demokratisasi serta meningkatnya globalisasi membuat ideologi Pancasila menjadi kurang relevan dalam dunia tanpa batas. Jatuhnya rezim orde baru yang diikuti dengan krisis ekonomi dan politik semakin membuat ideologi Pancasila sebagai basis ideologis, common platform, dan identitas nasional bagi negara dan bangsa Indonesia seolah menjadi semakin kehilangan relevansinya. Para pejabat dan kaum intelektual kurang tertarik untuk membicarakan Pancasila karena takut akan dituduh antek orde baru.

Terdapat tiga faktor yang membuat Pancasila semakin sulit dan marjinal dalam perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, Pancasila terlanjur tercemar karena kebijakan rezim Soeharto yang menjadikan Pancasila sebagai alat mempertahankan status-quo kekuasaannya. Rezim orde baru juga mendominasi pemaknaan Pancasila yang selanjutnya dilakukan indoktrinasi secara paksa

melalui Penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila). Kedua, liberalisasi politik dengan penghapusan ketentuan oleh Presiden BJ Habibie tentang Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam setiap organisasi (asas tunggal). Penghapusan ini memberi peluang bagi adopsi asas-asas ideologi lain, khususnya yang berbasis agama (religious-based ideology). Pancasila cenderung tidak lagi menjadi common platform dalam kehidupan politik. Ketiga, desentralisasi dan otonomi daerah yang sedikit banyak mendorong penguatan sentimen kedaerahan, yang jika tidak diantisipasi dapat menumbuhkan sentimen local-nationalism yang dapat tumpang tindih dengan ethno-nationalism (Azyumardi Azra, 2007).

Mengutip survei yang dilakukan aktivis Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (GMPI) tahun 2006, sebanyak 80 persen mahasiswa memilih syariah sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Sebanyak 15,5 persen responden memilih aliran sosialisme dengan berbagai varian sebagai acuan hidup. Hanya 4,5 persen responden yang masih memandang Pancasila tetap layak sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Penelitian itu dilakukan di Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan Universitas Brawijaya. Perguruan-perguruan tinggi tersebut selama ini dikenal sebagai basis gerakan politik di Indonesia. Survei tersebut menunjukkan semakin rendahnya semangat nasionalisme di kalangan generasi penerus bangsa. Banyak

generasi muda yang lupa isi harfiah Pancasila. Apalagi mengerti Pancasila secara maknawi (Kompas, 4/3/2008).

Kompas, edisi 1 Juni 2008 melaporkan hasil survei yang dilakukannya pada tanggal 28 s/d 29 Mei 2008 melalui telepon pada 835 responden berusia 17 tahun ke atas yang dipilih acak, dari Buku Petunjuk Telepon beberapa kota yaitu di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan Jayapura. Hasil survei Kompas tersebut menunjukkan bahwa 48,4% responden berusia 17-29 tahun menyebutkan kelima sila Pancasila salah atau tidak lengkap, 42,7% responden berusia 30-45 tahun salah menyebutkan kelima sila Pancasila, dan responden berusia 46 tahun ke atas lebih parah lagi, yakni sebanyak 60,6% salah menyebutkan kelima sila Pancasila. Dari kelima sila Pancasila, ternyata sila keempat merupakan sila yang paling banyak dilupakan orang. Menurut survei Kompas, sebanyak 39,4% responden salah menyebutkan sila yang menjadi dasar kehidupan demokrasi tersebut. Sila pertama yang paling tepat disebutkan yakni sebanyak 81,6%. Hanya 12,3% yang salah menyebutkan.

Konsep Pendidikan Ekonomi.

Pendidikan ekonomi adalah bidang dalam ilmu ekonomi yang berfokus pada dua tema utama: 1) kondisi saat ini, dan upaya untuk meningkatkan, kurikulum ekonomi, bahan dan teknik pedagogis digunakan untuk mengajar ekonomi di semua tingkat pendidikan; dan 2) penelitian efektivitas teknik alternatif

pembelajaran di bidang ekonomi, tingkat melek huruf ekonomi berbagai kelompok, dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat melek ekonomi.

http://en.wikipedia.org/wiki/Economics_education

Pendidikan, menurut Webster's New World dictionary (1962), adalah "Suatu proses pelatihan dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, pikiran, watak dan lain-lain, khususnya melalui sekolah formal. Kegiatan pendidikan menyangkut produksi dan distribusi pengetahuan baik di lembaga reguler maupun non reguler". Karena mayoritas kegiatan tersebut berlangsung di lembaga pengajaran seperti sekolah swasta dan negeri

Ekonomi didefinisikan oleh P. Samuelson (1961) adalah "Suatu kegiatan tentang bagaimana manusia dan masyarakat memilih, dengan atau tanpa menggunakan uang, untuk memanfaatkan sumber daya produksi yang langka untuk menghasilkan barang dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi, sekarang dan masa yang akan datang, oleh sekelompok orang atau masyarakat". Intinya : ekonomi adalah kegiatan mengenai produksi dan distribusi segala sumber daya yang langka baik barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh manusia. Dengan dua kata kunci yaitu (1) Kelangkaan (scarcity) dan (2) Kebutuhan (needs)

Pendidikan ekonomi merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik/masyarakat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan sumber daya produksi yang langka untuk menghasilkan barang atau jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi maupun produksi lebih lanjut.

Konsep pendidikan ekonomi diatas mengandung makna adanya pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi agar masyarakat yang diberdayakan itu mempunyai kekuatan atau “daya” atau mempunyai kemampuan untuk hidup layak sama dengan temannya sesama manusia.

Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary dalam Mardi Yatmo Hutomo (2000:1), kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu (1) *to give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan.

Terdapat 4 konsep pemberdayaan ekonomi menurut Sumodiningrat (1999) seperti yang dikutip oleh Mardi Yatmo Hutomo (2000:6), secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri; (2) Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang

benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural; (3) Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: (a) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; (b) penguatan kelembagaan; (c) penguasaan teknologi; (d) pemberdayaan sumberdaya manusia. (4) Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang; (5) Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah: (a) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (b) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*; (c) pelayanan pendidikan dan kesehatan; d)penguatan industri kecil; (e) mendorong munculnya wirausaha baru; dan (f) pemerataan spasial; (6) Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup:a) peningkatan akses bantuan modal usaha; b) peningkatan akses pengembangan SDM; dan c) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Menurut Ginandjar Kartasasmita (1996), pemberdayaan ekonomi rakyat adalah Upaya yang merupakan pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya.

Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.

Jadi tulisan ini akan mengacu pada dua pemahaman tentang pendidikan ekonomi yaitu pendidikan ekonomi yang mengacu pada bagaimana upaya meningkatkan kurikulum ekonomi, bahan dan teknik pedagogis untuk mengajar ekonomi di semua tingkat pendidikan. Yang kedua adalah pendidikan ekonomi ditinjau dari sisi pemberdayaan ekonomi.

Konsep Ekonomi Kerakyatan.

Konsep ekonomi kerakyatan (*grass-roots economy*) merupakan bentuk dari ekonomi yang berbasis rakyat (*people bases economy*) dan ekonomi terpusat pada kepentingan rakyat (*people centered economy*) yang merupakan inti dari Pasal 33 UUD 1945 terutama ayat 1 dan 2 (Sri Edi Swasono, 2012;20). Berdasar

konsep ini maka Ekonomi rakyat mempunyai peran yang sangat strategis dalam sistem dan struktur ekonomi di Indonesia.

Dengan peran strategisnya ekonomi rakyat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kehidupan ekonomi nasional daerah dan ekonomi nasional. Melaksanakan pembangunan ekonomi rakyat pada hakikatnya melaksanakan Doktrin Kebangsaan dan Doktrin Kerakyatan.

Makna ekonomi rakyat sebagai strategi pembangunan itu antara lain: (1) dengan rakyat yang secara partisipatori-emansipatori berkesempatan aktif dalam kegiatan ekonomi akan lebih menjamin nilai tambah ekonomi optima yang mereka hasilkan dapat secara langsung diterima oleh rakyat. Pemerataan akan terjadi seiring dengan pertumbuhan

(2) Memberdayakan rakyat merupakan tugas nasional untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga rakyat menjadi pelaku (*assets*) aktif pembangunan. Subsidi dan proteksi kepada rakyat untuk membangun diri dan kehidupan ekonominya merupakan investasi ekonomi nasional dalam bentuk investasi sumber insani manusia (*human invesment*) bukan pemborosan atau *inefficiency*, serta mendorong tumbuhnya kelas menengah yang berbasis akar rumput (*grass-roots*)

(3) Pembangunan ekonomi rakyat meningkatkan daya beli rakyat yang kemudian akan menjadi energi rakyat untuk lebih mampu membangun dirinya sendiri (*self empowering*) sehingga rakyat mampu meraih “nilai tambah ekonomi” dan sekaligus “nilai tambah sosial” (nilai tambah kemartabatan).

(4) pembangunan ekonomi rakyat sebagai pemberdayaan rakyat secara bersama-sama akan merupakan peningkatan posisi tawar kolektif untuk lebih mampu mencegah eksploitasi dan subordinari ekonomi terhadap rakyat

(5) Bila rakyat lebih aktif dan lebih produktif dalam kegiatan ekonomi maka nilai tambah ekonomi akan sebanyak mungkin terjadi dalam negeri dan untuk kepentingan ekonomi dalam negeri.

6. pembangunan ekonomi rakyat akan lebih menyesuaikan kemampuan rakyat yang ada dengan sumber-sumber dalam negeri yang tersedia artinya berdasar strategi yang hanya menggunakan sumber-sumber lokal (resources-based) dan terpusat pada rakyat (people centered)

7. pembangunan ekonomi rakyat akan lebih menyerap tenaga kerja

8. Pembangunan ekonomi rakyat akan lebih cepat menghasilkan (quickly yielding) dalam suasana ekonomi yang sesak nafas dan langka modal.

9. Pembangunan perekonomian rakyat sebagai sokoguru perekonomian nasional akan meningkatkan kemandirian ekonomi dalam negeri, akan menekan sebanyak mungkin ketergantungan akan kandungan import dan meningkatkan kandungan domestik produk-produk industri dalam negeri.

Pemberdayaan perekonomian rakyat yang akan lebih mampu memperkuat pasaran dalam negeri yang akan menjadi dasar bagi pengembangan pasaran luar negeri

Dalam globalisasi ini kita harus tetap waspada terhadap paham globalisme yang cenderung menyingkirkan paham nasionalisme. Kepentingan nasional Indonesia

harus tetap kita utamakan sebagaimana negara-negara adidaya selalu mempertahankannya pula dengan berbagai dalih ekonomi ataupun politik . Pembangunan perekonomian rakyat akan menjadi akar bagi penguatan fundamental ekonomi nasional dan menjadi dasar utama bagi realisasi nasionalisme ekonomi.

Pembanguann perekonomian rakyat bicara mengenai perlunya mempertahankan daulat rakyat bukan daulat pasar

Pembangunan perekonomian rakyat merupakan misi politik dalam melaksanakan “demokratisasi ekonomi” sebagai sumber rasionalitas bagi penguatamaan dan pemihakan kepada rakyat kecil.

Perlu ditinjau ulang strategi-strategi pembangunan yang menyatakan perlunya pergeseran paradigma-paradigma dalam pemikiran ekonomi. Perekonmian rakyat memperoleh tempat dalam rekonsiderasi. Mereka yg mau melepaskan ortodoksi perlu membaca ide-ide lama dan baru mengenai social market economy.

Secara keseluruhan butir-butir diatas akan lebih menjamin terjadinya pembanugnan di indonesia

Pembangunan ekonomi kerakyatan bertumpu pada platform bahwa yang kita bangun adalah rakyat, bangsa dan negara. Pembangunan pertumbuhan ekonomi (GNP) adalah derivat dari platform ini sebagai pendukung dan fasilitator bagi pembangunan rakyat, bangsa dan negara.

Dalam kenyataan ekonomi rakyat mampu menghidupi sebagian terbesar dari rakyat Indonesia ditengah-tengah pasang surutnya sektor perekonomian formal

modern, sejak awal kemerdekaan hingga saat ini.

Selama ini khususnya dalam masa-masa sulit, ekonomi rakyat memberikan lapangan kerja dan juga memberi kehidupan murah kepada rakyat khususnya kepada buruh-buruh korporasi-korporasi besar berupah rendah. Dengan kata lain ekonomi rakyat memberi / mensubsidi perekonomian besar.

Pendekatan kooperative dalam membangun ekonomi rakyat akan menumbuhkan kekuatan ekonomi yang berlipt ganda.

Berdasar konsep-konsep diatas maka penerapan pendidikan ekonomi kedepan harus lebih disempurnakan dengan:

1. Penyempurnaan nilai-nilai yang ada dalam kurikulum pendidikan ekonomi berbasis nilai-nilai Pancasila dan ekonomi kerakyatan.
2. Metode pengajaran yang lebih mengutamakan siswa (student centre) dengan metode yang lebih variatif.
3. Sebaiknya mulai ditumbuh kembangkan lagi gerakan berkooperasi sejak pendidikan dini mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi. Misal didirikan koperasi sekolah dengan pengawasan guru di tingkat pendidikan Dasar dan Menengah. Sedang di tingkat pendidikan Taman Kanak-kanak hanya diperkenalkan nilai-nilai gotong royong dalam ekonomi, lebih mengutamakan kegiatan sebagai usaha bersama.
4. Pada tingkat pendidikan Tinggi penerapan koperasi sebagai wadah ekonomi kerakyatan dan pengamalan sila-sila dalam Pancasila seharusnya mulai digalakkan lagi agar mahasiswa mulai

mengenal kembali dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan nilai ekonomi kerakyatan.

5. Pada jalur pendidikan non formal tidak berlebihan jika semua lembaga masyarakat yang ada mulai diingatkan kembali bahwa kita punya azas Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam menghadapi semua permasalahan yang ada terutama menghadapi persaingan di tingkat ASEAN dengan kehadiran AFTA di tahun 2015.
6. Semua mass media baik tulis maupun elektronik serta dunia maya juga harus diingatkan kembali pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam setiap kegiatan.
7. Tentu saja semua itu akan berhasil ketika semua komponen yaitu pemerintah, masyarakat dan pihak swasta bersatu padu atau sepakat mengembalikan pengamalan Pancasila dan ekonomi kerakyatan dalam praktek kehidupan sehari-hari.
8. Dengan konsep bekerjasama dan bukan persaingan maka persatuan dan kesatuan akan otomatis terjalin, hala akan sangat menguntungkan untuk menghadapi AFTA 2015 dan sekaligus sebagai bentuk pendidikan pluralisme di bidang pendidikan.
9. Di tingkat Perguruan tinggi, pendidikan ekonomi sebenarnya sangat diperlukan terkait dengan jiwa kreatif dan inovatif yang harus dimiliki oleh setiap sarjana yang baru lulus agar mempunyai kecakapan yang setara dengan dengan sarjana yang sudah bekerja.
10. Pendidikan ekonomi juga bisa berupa pemberdayaan untuk masyarakat agar masyarakat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

DAFTAR PUSTAKA

- Azyumardi Azra. 2007. Keragaman Indonesia: Pancasila dan Multikulturalisme. Yogyakarta: Makalah Semiloka Nasional Keragaman 13-14 Agustus 2007.
- Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi Moneter BI, Doddy Zulverdi, di Gedung Bank Indonesia, Selasa (18/2/2014). http://en.wikipedia.org/wiki/economics_education. di download tanggal 28 Mei 2014 jam 10:
- Hutomo, Mardi Yatmo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*, Naskah No. 20, Juni-Juli 2000.
- Integrasi Nilai-Nilai Pancasila Ke Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Moral Bagi Peserta Didik* (Studi Kasus Di Kabupaten Karangayar Jawa Tengah), Triyanto, dkk, Dipublikasikan dalam Prosiding Semnas LPP UNS, 03 Nop. 2012, ISBN 978-602-99130-1-9
- Swasono, Sri-Edi, *Meluruhkan Penyelewengan Mandat Konstitusi Pancasila Nasionalisme Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme*, Makalah untuk kuliah umum di Universitas Negeri Malang, 4 Juli 2012.